

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kali membahas mengenai kepemimpinan perempuan dalam birokrasi memang sangat menarik untuk dibicarakan dan tidak ada habisnya. Menurut Auguste Comte, dalam Helen A. Moor, menyatakan bahwa wanita secara sosiologi dibatasi perannya pada lingkungan keluarga, dan bersifat sub-ordinat.¹ Dari segi konstitusional, posisi perempuan bersifat inferior terhadap laki-laki.

Peran sub-ordinat terhadap perempuan juga terjadi pada birokrasi sehingga menghasilkan partisipasi diluar peran domestiknya, sekaligus mengingkari seluruh kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Karena salah satu perwujudan dari nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi adalah isu tentang kesetaraan gender di birokrasi. Dari tidak seimbang nya posisi perempuan dan laki-laki inilah yang kemudian memunculkan pandangan pengarusutamaan gender.² Posisi perempuan dan laki-laki di birokrasi sampai saat ini masih belum berimbang, terutama dalam jabatan publik. Keberadaan jabatan publik menjadi sebuah posisi yang strategis dalam mengambil dan membuat kebijakan. Perempuan belum dapat diberikan keleluasaan berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan. Dalam hal ini posisi perempuan masih belum dapat diperhitungkan sebagai sosok yang penting dalam peran pengambil kebijakan. Keadaan ini bertolak belakang dengan teori *Equilibrium* yang

¹ Anwar, 2018. "Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Pada Madrasah di Kota Pare pare)". *Jurnal Al-Maiyah*, 10 (1) Januari-Juni 2018. Hal 48-50

² Ariana, 2018. "Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender Dalam Penempatan Pegawai Pada Posisi Struktural di Birokrasi di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Politik Profetik*. 6 (2). hal 139-140.

menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhitungkan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.³

Hal lain yang menghambat perempuan dalam birokrasi adalah budaya patriarki, budaya patriarki sebagai kerangka pola perilaku sebagian besar masyarakat merefleksikan dominasi laki-laki dengan perempuan. Pelestarian dan sosialisasi, telah membentuk pencitraan yang sangat kuat terhadap identitas gender dalam relasi-relasi sosial, pada sektor profesi, misalnya menandai terjadinya maskulinisasi pembiasaan gender.⁴ Konstruksi tentang identitas gender⁵ telah berakar kuat di tengah-tengah sistem sosial, dikarenakan oleh tekanan sistem nilai-nilai yang berlapis-lapis, dan struktur sosial yang kuat, dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, struktur Negara, dan sistem global yang mengikis peran-peran tradisional perempuan.⁶

³ Rudi, Aldianto. 2016. "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. 3 (1), hal 89.

⁴ Maskulinisasi pembiasaan gender adalah proses dalam penentuan posisi atau kedudukan dalam pekerjaan mulai mengutamakan laki-laki daripada perempuan.

⁵ Gender diperkenalkan untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan (kodrati) dan adapun bersifat bentuk budaya. Gender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian kesetaraan gender yang dimaksud adalah kondisi dimana laki-laki ataupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Hal ini selaras dengan undang-undang kesetaraan gender pada Undang-undang dasar 1945, pasal 27, ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Referensi buku Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia oleh Dr. Riant Nugroho

⁶ Anwar, 2018 "Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Pada Madrasah di Kota Pare pare)". *Jurnal Al-Ma'iyah*. 10. (1). Hal 50-51.

Keterkaitan birokrasi masih sedikit perempuan menduduki jabatan strategis pada jabatan public. Salah satu aspek mendasari alasan dalam implementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan kualitas Pegawai Negeri Sipil perempuan. Perhatian terhadap pemberdayaan PNS perempuan sangat penting dan mendesak agar terjadi pengarusutamaan gender dan terjadi keseimbangan dan keadilan di dalamnya.⁷

Terwujudnya peran perempuan dalam memegang peran sebagai kepemimpinan membawa dampak yang lebih baik terhadap permasalahan kesetaraan gender dengan ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan dalam jabatan publik. Tujuan dari seorang pemimpin perempuan menduduki jabatan publik adalah untuk dapat membuat kebijakan agar tersalurkan apa yang diinginkannya dan ikut serta dalam pembangunan.⁸

Terwujudnya peran perempuan dalam memegang peran sebagai kepemimpinan membawa dampak yang lebih baik terhadap permasalahan kesetaraan gender dengan ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan dalam jabatan publik. Tujuan dari seorang pemimpin perempuan menduduki

⁷ Jodah No Ecchi. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Administrasi Pemerintahan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP, UMRAH*. Hal 3-4

jabatan publik adalah untuk dapat membuat kebijakan agar tersalurkan apa yang diinginkannya dan ikut serta dalam pembangunan. Salah satu contoh peran kepemimpinan perempuan terlihat dari kepemimpinan presiden perempuan pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri yang membantu mengembalikan kestabilan nilai tukar rupiah, memberantas korupsi dengan membuat lembaga KPK dan membuat peraturan perundang-undangan untuk memberantas terorisme yang dilatar belakangi dengan terjadinya kasus Bom Bali.⁹

Kepemimpinan perempuan di berbagai daerah telah memberikan warna berbeda. Kepemimpinan perempuan yang terbelang feminisme memberikan sebuah pendekatan empati. Pendekatan ini membedakan dengan pendekatan kepemimpinan maskulin. Kepemimpinan yang feminim dan kebijakan pembangunan yang pro pada perempuan dianggap lebih dapat menyelesaikan persoalan mendasar di dalam masyarakat seperti isu kesehatan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan bagi perempuan, maupun isu-isu kekerasan merawat diri tetapi juga lingkungan sosialnya.¹⁰

Seperti yang dilakukan oleh Tri Rismaharini Walikota Surabaya. Risma menjadi pemimpin feminisme yang dapat dikatakan sukses menjalankan roda kepemimpinannya sebagai wali kota perempuan yang dapat dilihat dari peran Risma dalam membangun Surabaya. Peran beliau berhasil melalui 3 Program yaitu penyediaan taman, pembangunan infrastruktur dan penanganan terhadap banjir.¹¹

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K13) pada tahun 2014. Sesuai dengan Permendikbud No. 79 Tahun 2014: Pasal 1 ayat (1),

⁹ *Ibid.* Hlm. 14.

¹⁰ Tuti WD Retnowati, 2020. "Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model birokrasi Efektif". *Perspektif komunikasi : Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*.

¹¹ *Ibid.*

muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Pasal 2 ayat (1), muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan lokal dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksud untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggal.¹²

Kurikulum K13 mengharuskan muatan lokal seperti mata pelajaran BAM yang ada di Sumatera Barat dihapuskan. Mata pelajaran BAM pada dasarnya berisi pemahaman mengenai lingkungan alam, sosial dan budaya di Minangkabau. Mata pelajaran BAM ini hanya terdapat di Sumatera Barat. Namun ketika KTSP dikembangkan menjadi Kurikulum 2013, mata pelajaran BAM ikut diganti menjadi pelajaran Prakarya. Muatan lokal BAM yang berfokus pada pembentukan karakter siswa agar sesuai dengan adat Minangkabau, sedangkan mata pelajaran prakarya cenderung memfasilitasi peserta didik agar mampu berekspresi kreatif melalui keterampilan cipta karya.¹³

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dalam pemulihan Pendidikan dampak pandemic covid-19 adalah mempersiapkan Kurikulum Merdeka sebagai pemulihan pembelajaran.¹⁴ Dalam mempersiapkan kurikulum merdeka Dinas Pendidikan Kota Solok yang dipimpin oleh Rosavella membuat sebuah kebijakan muatan lokal yaitu Bahasa Sastra Minangkabau yang membahas adat istiadat serta budaya ciri khas Kota Solok.

¹² Afrilya, Rau Cinta. 2020. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENAPAN), *"Hilangnya kearifan Lokal di Dalam Pendidikan Formal : Studi Kasus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.* 1. Hlm 149-150

¹³ *Ibid.* hlm 150-151

¹⁴ Kemendibud.go.id

Peneliti melihat pada Tahun 2019 pandemi *Covid -19* melanda seluruh Indonesia termasuk Kota Solok sendiri. *Covid-19* melumpuhkan segala sektor yang ada terutama ekonomi, pendidikan dan sosial. Sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07 / MENKES/413/2020 menyatakan bahwa *Coronavirus Disease (Covid-19)* telah dinyatakan oleh WHO sebagai *Global Pandemi* dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengadilannya. Dampak dalam sektor pendidikan yang mengharuskan proses ajar mengajar dilakukan secara online yang membuat sebagian masyarakat belum siap dengan hal tersebut dan dampak pada sektor sosial, masyarakat diharuskan menjaga jarak antar sesama dan aktifitas diluar ruangan dikurangi.

Merujuk penelitian terdahulu dari Nurhikmah pada Tahun 2021 dengan judul Skripsi *Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa*.¹⁵ Dalam penelitian Nurhikmah menggambarkan pemimpin perempuan tidak hanya sebagai pemenuh kuota yang telah disediakan, namun pemimpin perempuan disini berusaha meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi tantangan-tantangan serta mampu memberikan dorongan bagi bawahannya dalam menjalankan organisasi. Sedangkan menurut penelitian Afriani dengan judul Skripsi *Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi pada*

¹⁵ Nurhikmah, Skripsi “*Peranan Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Kantor Pendidikan Kabupaten Gowa*”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

Kantor Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).¹⁶ Bertentangan dengan penelitian Nurhikam dalam penelitian Afriani peran pemimpin perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala seksi di Kantor Camat Pangkajene masih tergolong pasif sehingga lingkungan kerja belum berjalan begitu baik, karena setiap kepala seksi belum berperan aktif dalam merangkul dan memberikan dorongan kepada bawahannya dalam bekerja.

Dari dua penelitian diatas terlihat perbedaan mencolok dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Era *Covid-19* (Studi Terhadap: Rosavella Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok). Peneliti melihat perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, dimana dalam penelitian ini lebih membahas secara mendalam tindakan ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin perempuan selama pandemic dan pengembalian mata pelajaran muatan lokal yang memuat identitas daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan penting diperhatikan terlebih dalam posisi menempati jabatan publik, dengan menempati posisi yang strategis pada jabatan publik perempuan akan mempengaruhi instansi pemerintah dalam melahirkan suatu kebijakan dan program-program yang sensitif terhadap persoalan perempuan.

Kehadiran perempuan dalam menduduki jabatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat penting untuk mendongkrak semangat pegawai perempuan lainnya untuk meningkatkan kualitas diri dan hal ini juga perlu dicermati kehadiran perempuan yang

¹⁶ Afriani, Skripsi "Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)", Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Makassar 2021.

menduduki jabatan tersebut bisa berperan dalam pembangunan dan serta meningkatkan kualitas dari organisasi yang dipimpinnya.

Pada Tahun 2022 memasuki periode kedua walikota Zul Elfian kembali melantik jajaran eksekutif SKPD dan hanya terdapat 5 orang perempuan yang duduk di jajaran SKPD, terjadi penurunan dari Tahun 2019 di jajaran SKPD terdapat 9 orang perempuan, 5 orang perempuan yang duduk di jajaran SKPD pada Tahun 2022 yaitu Novira Handayani sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, Rosavella sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Elvy Basri sebagai Kepala Dinas Pariwisata, dan Nova Elfino sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.¹⁷ Dari 5 orang yang dilantik tersebut peneliti tertarik untuk membahas Kepemimpinan Rosavella yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kota Solok yang sudah menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan sejak Tahun 2018.

Dibalik jabatan yang pernah diampu oleh Rosavella tentu memiliki peran yang sangat baik seperti peran dalam membina sekolah menjadi sekolah unggulan wawasan wiyata mandala Tahun 2000 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada Tahun 2007.¹⁸ Satya Lencana Karya Satya merupakan bentuk tanda penghormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penghargaan ini diperoleh Rosavella ketika menjabat sebagai Kepala SMA N 2 Kota Solok. Tentu hal tersebut membuktikan bahwa perempuan mampu mengambil peran sebagai pemimpin sehingga dapat membantu pembangunan. Rosavella juga pernah mencalon sebagai Wakil wali Kota Solok dengan

¹⁷ Surat Perintah Tugas. Nomor : 090/ /BALITBANG-2021

¹⁸Sumber dari BKPSDM Kota Solok Tahun 2021

pasangan Yumler Lahar pada Pilkada pada Tahun 2005 dan menjadikan Rosavella perempuan pertama yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Solok.

Tabel 1.2
Jabatan yang pernah diduduki Rosavella

| No | Jabatan | Tahun |
|----|---|---------------|
| 1 | Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Solok | 2000 -2006 |
| 2. | Kepala Sekolah SMA N 2 Kota Solok | 2006-2012 |
| 3 | Kepala Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan | 2012-2014 |
| 4 | Sekretaris Dinas Pendidikan | 2014-2017 |
| 5 | Kepala Dinas Sosial | 2017-2018 |
| 6 | Kepala Dinas Pendidikan | 2018-sekarang |

Sumber dari BKPSDM Kota Solok

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K13) sesuai dengan Permendikbud No. 79 Tahun 2014: Pasal 1 ayat (1), muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Pasal 2 ayat (1), muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan lokal dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksud untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggal.¹⁹ Juga berdampak pada pergantian mata pelajaran muatan lokal.

Mata pelajaran BAM pada dasarnya berisi pemahaman mengenai lingkungan alam, sosial dan budaya di Minangkabau. Namun ketika KTSP dikembangkan menjadi Kurikulum

¹⁹ Afrilya, Rau Cinta. 2020. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENAPAN), "Hilangnya kearifan Lokal di Dalam Pendidikan Formal : Studi Kasus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 1. Hlm 149-150

2013, mata pelajaran BAM ikut diganti menjadi pelajaran Prakarya. Muatan lokal BAM yang berfokus pada pembentukan karakter siswa agar sesuai dengan adat Minangkabau, sedangkan mata pelajaran prakarya cenderung memfasilitasi peserta didik agar mampu berekspresi kreatif melalui keterampilan cipta karya.²⁰

Dampak dari mata pelajaran BAM yang dihilangkan dari muatan lokal menjadikan siswa tidak paham terhadap norma norma sosial yang berlaku di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat pada umumnya. Sehingga menjadikan siswa tidak kenal dengan adat istiadat Minangkabau dan hal ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dalam upaya persiapan pemulihan pembelajaran adalah membuat Kurikulum Merdeka.²¹ Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Bersama pemerintah Kota Solok mulai merancang program muatan lokal baru yaitu Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) yang dilakukan di tengah masa sulit pandemi *covid-19* untuk upaya pemulihan pembelajaran. BSM ini merupakan inovasi dari Wali Kota Solok dalam dunia pendidikan yang dipercayakan pengembangannya kepada Dinas Pendidikan Kota Solok. Untuk menjawab keresahan masyarakat dimana mulai lunturnya pengetahuan siswa siswa yang ada di Kota Solok dalam memahami adat istiadat dan norma norma yang berlaku di Kota Solok. BSM ini merupakan muatan lokal yang berisikan pembelajaran tentang adat istiadat dan norma sosial khusus di Kota Solok. Di Dalam program ini Rosavella melibatkan seluruh guru yang ada di Kota Solok dalam menentukan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran dan para guru dilibatkan dalam membuat buku ajar untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Hal ini sesuai

²⁰ *Ibid. hlm 150-151*

²¹ Kemdigbud.go.id

dengan yang disampaikan oleh Yuli Asril, sebagai Wali Kelas SD 03 Simpang Rumbio Kota Solok:

“kebijakan BSM sebagai muatan lokal untuk meningkatkan karakter siswa di Kota Solok sangat diperlukan karena siswa siswa telah terpengaruh oleh gadget dan pengaruh dunia luar seperti Kpop dan semacamnya.”

Muatan lokal BSM baru dapat di resmikan pada tanggal 4 Agustus Tahun 2022. Pengembangan muatan lokal BSM ini tertunda peresmiannya oleh pandemi.²² Muatan Lokal BSM ini menjadi muatan lokal yang hanya ada di Kota Solok. Dalam program BSM ini terdapat kebijakan lain yang diperuntukkan untuk siswa yang ada di Kota Solok yaitu setiap siswa setiap hari kami wajib menggunakan baju adat taluak balango yaitu baju ada untuk pria yang ada di Kota Solok dan untuk siswi setiap hari Kamis wajib menggunakan baju Basiba. Tujuan dari BSM ini adalah untuk meningkatkan kecintaan murid murid yang ada di Kota Solok terhadap budaya daerah dan menanamkan sosiokultural yang ada di sekitar.

Selama pandemi pelaksanaan kegiatan belajar siswa Sekolah Dasar (SD) sempat belajar online, namun belajar online untuk sekolah dasar terutama siswa kelas 1 sampai kelas 3 masih belum bisa dengan baik menerima pelajaran yang diberikan oleh para guru. Hal lain yang menjadi hambatan mempersulit dalam kegiatan belajar pada *Covid-19* adalah tidak semua orang tua murid mengizinkan anaknya untuk melaksanakan vaksinasi hingga menyebabkan kegiatan belajar terbagi menjadi dua yaitu siswa yang telah vaksin belajar tatap muka dan siswa yang belum vaksin belajar online, hal ini seperti yang dikatakan oleh Yuli Asril sebagai Wali Kelas SD 03 Simpang Rumbio Kota Solok, dia mengatakan:

“Kami para guru kesulitan dalam mengajar, karena metode pembelajaran yang dibagi menjadi dua yaitu tatap muka dan online. Hal ini disebabkan oleh tidak seluruh orang tua murid menyetujui vaksin untuk anak sekolah dasar. Kami sangat kewalahan dalam membuat metode belajar online dan tatap muka, terutama untuk siswa kelas 1 yang

²² Yasril.

belum mengerti apa apa serta tidak semua orang tua murid memiliki media untuk memfasilitasi anaknya dalam belajar online”

Merebaknya pandemi *Covid-19* di Indonesia, menjadikan proses belajar secara tatap muka di Kota Solok menjadi terganggu. Guna menciptakan ruang belajar yang aman dari pandemi *Covid-19*, Rosavella sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok bersama *Ruangguru* menggelar pelatihan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai tanggal 13 sampai 15 Juli Tahun 2021.²³ Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang belajar yang aman dari pandemi *Covid-19* dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Solok ditengah pandemi.

Sesuai dengan SKB Empat Menteri dan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kesehatan dan keselamatan siswa, guru, beserta staf sekolah. Sejalan dengan SKB Empat Menteri dan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Rosavella membuat kebijakan berdasarkan pertimbangan dari Wakil Wali Kota untuk memudahkan siswa SMP dan SD yang ada di Kota Solok agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif yaitu membagi system belajar menjadi 50% tatap muka dan 50% dirumah, serta untuk orang tua yang membimbing anaknya belajar dirumah yang tidak memiliki fasilitas seperti smartphone dipersilahkan untuk menjemput tugas ke sekolah disaat jadwal siswa untuk belajar di rumah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Amri Yulis selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solok. Dia mengatakan

” Kebijakan ini diambil dengan banyak pertimbangan dan masukan dari Wakil Walikota Solok. Untuk memudahkan pembelajaran bagi murid diberikan kemudahan kepada orang tua dan murid yang tidak memiliki smartphone untuk menunjang anak belajar dirumah, diperbolehkan untuk menjemput tugas ke sekolah ”²⁴

²³ Dikutip dari MinangkabauNews. <https://www.google.com/amp/s/minangkabaunews.com/pandemi-covid-19-disdik-kota-solok-gelar-pelatihan-ptm-buat-guru/%3famp>

²⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solok

Kebijakan tersebut menjadi alternatif kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Solok dalam menghadapi lonjakan *Covid-19* yang terjadi di Kota Solok. Kebijakan lain yang diambil Dinas Pendidikan Kota Solok dalam lonjakan *Covid-19* yaitu mempersiapkan calon pengawas sekolah sebanyak 20 orang dengan tujuan untuk mempersiapkan sumber daya pendidikan agar dapat memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan. Rosavella mengatakan:

“Kota Solok masih terdapat kekurangan tenaga pengawas sekolah sehingga menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pengawas Sekolah”.²⁵

Tujuan dari pembentukan tenaga pengawas sekolah ini adalah untuk melakukan Pengawasan, pembinaan, penilaian dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun manajerial, selain itu para guru juga menjadi role model bagi anak-anak di sekolah.

Untuk memperlancar kegiatan pendidikan di Kota Solok, Rosavella mendukung vaksinasi untuk murid Sekolah Dasar (SD) mulai dari usia 6 sampai 11 Tahun sebagai upaya pencegahan Covid-19. Walaupun ditengah masyarakat tersebar opini tentang bahaya vaksin untuk anak, namun Rosavella bersama pemerintah Kota Solok dan pihak Kepolisian ikut meyakinkan para orang tua untuk melaksanakan vaksinasi untuk siswa sekolah dasar. Kegiatan ajar mengajar tetap dilaksanakan namun untuk siswa yang belum dapat mengikuti sekolah tatap muka sebelum divaksinasi dan masih belajar dirumah. Rosavella selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok terus memperjuangkan bagaimana cara siswa agar dapat belajar tatap muka kembali dengan menyuarakan vaksin aman bagi anak. Dia mengatakan:

²⁵ Dikutip dari Antara SUMBAR. <https://sumbar.antaranews.com/berita/462281/penyiapkan-calon-pengawas-sekolah-berkualitas-melalui-diklat-digelar-disdik-solok>. Diakses pada Rabu 11 Mei 2022. Pukul 00:25.

“Disdik Kota Solok bersama seluruh Kepala SD di Kota Solok menyatakan siap untuk menyukseskan program vaksinasi murid mulai dari umur enam hingga 11 Tahun.”²⁶

Dengan komitmen dan kedisiplinannya Rosavella terus menyuarakkan vaksin aman untuk anak umur 6 sampai 11 Tahun. Sebanyak 250 murid Sekolah Dasar di Kota Solok mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut. Kedisiplinan dan komitmen yang tinggi menimbulkan etos kerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berasumsi bahwa Rosavella sebagai pemimpin perempuan telah bisa menjadi *agen of change* dan penentu arah dalam menjalankan roda kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok. Permasalahan yang diteliti secara rinci adalah: **Bagaimana peran kepemimpinan Rosavella sebagai kepala dinas pendidikan Kota Solok dalam menghadapi pandemi covid-19?**

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepemimpinan Rosavella sebagai kepala dinas pendidikan Kota Solok dalam menghadapi pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep peran kepemimpinan perempuan dalam jabatan public

²⁶ Dikutip dari Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/485329/disdik-kota-solok-siap-sukseskan-vaksinasi-murid-sd-umur-6-11-Tahun> . Diakses pada Rabu 11 Mei 2022, Pukul 00:35.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi wawasan baru baik bagi pemerintah terkait ataupun kepada masyarakat umum. Serta dapat sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi nantinya.

